

PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP TINGKAT KEMADIRIAN KEUANGAN DAERAH

Kurnia Rina Ariani¹ dan Gustita Arnawati Putri²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: kra123@ums.ac.id

²Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
email: gustita.ap@gmail.com

Abstract

This research aimed to examine the influence of capital expenditure (Belanja Modal) and general allocation fund (Dana Alokasi Umum) to the level regional financial independence in Central Java regencies. Based on the literature review, the reasearch hypothesized that capital expenditure and general allocation fund have significant effect on the level regional financial independence. Total sample on this research is 35 cities/regencies in Central Java each year within three period from 2012-2014. Using multiple regression the empirical result show that capital expenditure have positive effect on regional financial independence and general allocation fund have negative effect on regional financial independence.

Keywords: *Capital Expenditure, General Allocation Fund, Region Financial Independence*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber - sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih di pegang oleh pemerintah pusat. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber – sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar- benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Muliana, 2008).

PAD daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat (Adi, 2006). Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Wong (2004) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap DAU dibandingkan PAD dalam mendanai belanja daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu

sendiri (Rizky dan Suryo, 2009). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Nagathan dan Sigvagananam (1999) yang menemukan pengaruh negatif antara besarnya DAU dan *tax effort* daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung mempertahankan penerimaan DAU dikarenakan jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah itu sendiri.

Sarug dan Sagbas (2008) menemukan bahwa dana transfer dari pemerintah (*intergovernmental transfer*) dapat menjadi substitusi ataupun dapat menjadi stimulus dalam belanja daerah. Apabila efek substitusi ditemukan maka pemerintah daerah akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang mereka terima yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya apabila efek stimulus yang ditemukan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pajak daerahnya. Akan tetapi pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah, daerah tidak menjadi lebih mandiri namun semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi, 2008).

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat dan menentukan arah kebijakan di masa yang akan datang mengingat pemberian DAU yang semula bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal, justru menjadi disinsentif bagi daerah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal daerahnya. Upaya pajak menjadi lebih rendah, harapan adanya peningkatan kemandirian daerah justru menjadi semakin jauh.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1, ayat 5 dari PP No. 58/2005 keuangan daerah secara umum diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

2.2. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Musgrave (1980) terdapat 4 indikator kinerja keuangan daerah

a. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirin keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muliana, 2009).

Tujuan kemandirian keuangan daerah mencerminkan suatu bentuk pemerintah daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Halim (2002) rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah.

b. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal dapat diartikan sebagai biaya pemeliharaan prasarana sosial ekonomi seperti angkutan, komunikasi, lembaga pendidikan dan kesehatan. Variabel-variabel kebutuhan daerah (*Fiscal need*) dibagi atas variable kependudukan dan variable kewilayahan. Variable kependudukan meliputi jumlah penduduk dan indeks kemiskinan relatif. Sementara itu untuk variable kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks kemahalan harga bangunan.

c. Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak, yang biasanya berupa pendapatan perkapita yang merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula perhitungan DAU.

d. *Tax Effort*

Besarnya penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam suatu daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkannya. Menurut Mulyanto (2007) upaya fiskal (*tax effort*) adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan dan dilawankan dengan potensi pajak (*tax capacity potensial*). Nilai *tax effort* yang diperoleh dari perbandingan penerimaan pajak

terhadap kapasitas fiskal tersebut berkisar 0-1. Adi (2006) menyatakan secara sederhana bila *tax effort* mendekati 1 maka dapat dikatakan posisi fiskal suatu daerah kuat, dan bila mendekati 0 posisi fiskal lemah.

2.3. Dana Alokasi Umum

Pasal 1 Ayat 21 dari UU no.33/2004 menyatakan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga sebagai sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal (Adi, 2006).

2.4. Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 53 belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya. Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah mempunyai strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

2.5. Pengembangan Hipotesis

Pemerintah memiliki dua alternative penggunaan alokasi anggaran yaitu belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam berbagai macam program layanan dan belanja tidak langsung yang bersifat operasional rutin. Dengan otonomi daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Semakin besar porsi alokasi anggaran belanja tidak langsung maka akan semakin kecil porsi alokasi anggaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Hidayati dan Yaya, 2013). Penelitian Ariani (2010), Rostina (2014) dan Simatupang (2016) menyimpulkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah, jika belanja meningkat maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002)

Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan fenomena umum, terlebih pada Negara yang menerapkan desentralisasi fiskal. Pemberian transfer dalam jangka pendek berfungsi untuk mengatasi ketidaksiapan fiskal daerah dalam berbagai pembiayaan daerah. Pemberian transfer didasarkan pada kapasitas fiskal daerah, semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, maka transfer yang diterima semakin menjadi rendah. Kebijakan ini disatu sisi dapat mengatasi ketidakseimbangan fiskal, namun disisi lain justru dapat menyebabkan kemalasan fiskal daerah (Adi, 2008). Daerah tidak terpacu untuk meningkatkan potensi lokalnya, dengan meningkatkan PAD, dikarenakan hal ini dapat berimbas pada penurunan penerimaan DAU. Sivagnan dan Naganathan (1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian dana transfer pemerintah pusat terhadap upaya pajak di India, hasil penelitian ini memberikan fakta empiris bahwa pemberian transfer justru memberikan pengaruh negatif terhadap upaya pajak yang pada gilirannya menurunkan pendapatan daerah sehingga tingkat kemandirian daerah juga akan semakin rendah. Penelitian Muliana (2009) dan Ariani (2010) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, yang berarti jika DAU meningkatkan maka akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah dengan kata lain ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi.

H₁: belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup, Populasi dan Sampel Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan, kemudian mencoba untuk dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah. Periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2012-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012-2014 yang diperoleh dari BPK RI.

3.2. Pengukuran Variabel

3.2.1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirin keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muliana, 2009).

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah : (Realisasi PAD)/(Total Realisasi Pendapatan Daerah)

3.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln Belanja Modal}$$

3.2.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

$$\text{DAU} = \text{Ln DAU}$$

3.3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan metode statistik dengan program SPSS versi 20.0 for windows untuk menguji hipotesis dan variabel yang digunakan. Data tersebut diolah dengan menggunakan analisa regresi linear berganda. Metode yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda (Multiple Linear Regression). Model regresi berganda dalam hipotesis ini adalah sebagai berikut :

$$\text{TKKD} = \alpha + \beta_1 \text{BM} + \beta_2 \text{DAU} + \epsilon$$

Keterangan:

TKKD	= TingkatKemandirian Keuangan Daerah
BM	= Belanja Modal
DAU	= Dana Alokasi Umum
α	= konstanta
β_1 - β_2	= koefisien regresi
ϵ	= <i>error term</i>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh Pemerintah Daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, 2013, dan 2014. Pengambilan sampel penelitian ini digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Sampel Penelitian Tahun 2012-2014

Kriteria	Jumlah
Pemda yang menerbitkan LKPD tahun 2012	35
Pemda yang menerbitkan LKPD tahun 2013	35
Pemda yang menerbitkan LKPD tahun 2014	35
Data <i>outlier</i>	(5)
Jumlah sampel diolah	100

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

4.1 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik terhadap normalitas ($K-S > 0,05$), multikolinearitas (tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10), Uji Autokorelasi dengan Nilai DW berada diantara $1,716 < DW < (4 - 1,716)$ dan heterokedastisitas dengan $\alpha > 0,05$. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik yang disyaratkan.

4.2. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 4.2 pada lampiran menunjukkan hasil uji regresi dengan nilai adjusted R^2 sebesar 0,399 atau 39,9%. Hal ini menunjukkan 39,9 % tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum. Nilai F yang diperoleh sebesar 33.930. Sedangkan nilai F tabel pada tingkat probabilitas sebesar 0,05 adalah 3,09 dengan probabilitas 0,000. Karena F hitung lebih besar dari F tabel dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kemandirian keuangan daerah atau dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.2 menunjukkan tanda koefisien dari belanja modal adalah positif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < p\text{-value}$ sebesar 0,05 menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah, maka H_1 diterima. Sebuah Pemerintah Daerah dengan kualitas layanan publik yang memuaskan selalu diikuti dengan tingginya partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang dicerminkan dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemda menggunakan PAD tersebut untuk belanja daerahnya termasuk belanja modal. Belanja modal kemudian diwujudkan ke dalam pembangunan daerah dan perbaikan daerah di berbagai sektor. Dengan demikian belanja modal dapat mempengaruhi tingkat kemandirian daerah.

Dalam upayanya untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dengan cara memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif dalam pembangunan. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (Wong, 2004). Dengan terpenuhinya fasilitas publik dapat mendorong masyarakat untuk membuka peluang usaha dan dapat menjalankan usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan potensi pendapatan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wong (2004), Ariani (2010) Rostina dan Simatupang (2016).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.2 menunjukkan tanda koefisien dari Dana Alokasi Umum adalah negatif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < p\text{-value}$ sebesar 0,05, menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian, jika dana alokasi umum bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah. Pemberian transfer pemerintah seperti DAU seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sarug dan Sagbas (2002) menemukan bahwa didaerah yang tergolong mempunyai pendapatan daerah yang rendah menyikapi pemberian transfer sebagai substitusi pendapatan daerah bukan sebagai stimulus, ketika efek stimulus ditemukan peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan potensi PAD yang cukup tinggi. Semakin kecil DAU dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer dari pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah akan terwujud. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sivagnan dan Naganathan (1999), Muliana (2009) dan Ariani (2010) bahwa dengan pemberian DAU justru meningkatkan kemalasan dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

Tabel 4.2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koef. Reg	t	Sig.	Keterangan
1(Constant)	2.480	5.372	0.000	
BM	.090	5.665	0.000	Signifikan
DAU	-1.171	-8.184	0.000	Signifikan
F hitung	33.930			
<i>p-value</i>	0,000			
Adjusted R^2	0399			

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2006

5. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa seharusnya pemberian DAU dijadikan stimulus untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali pendapatan asli daerahnya salah satunya dengan meningkatkan upaya pajak (*tax effort*) melalui reformasi pajak daerah yaitu dengan meniadakan pajak yang tidak produktif, memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif dalam pembangunan sehingga sumber pembiayaan daerah dapat ditopang oleh PAD dan tidak terlalu tergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah populasi dalam penelitian, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan banding dan dapat menambah variabel independen lainnya yang diperkirakan mampu mempengaruhi tingkat kemandirian daerah.

6. REFERENSI

- [1] Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antaraa Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Dana Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa- Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- [2] Adi, Priyo Hari. 2008. *Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah*. Jurnal Kritis. Universitas Satya Wacana. Salatiga.
- [3] Ariani, K. R. 2010. *Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tax Effort Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se Eks Karesdidenan Surakarta*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- [4] Brodjonegoro, Bambang dan Jorge Martine-Vasquez. 2002. *An Analysis Of Indonesia's Tarnsfer System : Recent Performance And Future Prospect*. George State University. Andrew Young School of Policy Studies.
- [5] Ismi Rizky dan Suryo 2009. *Pengaruh PAD Dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirin Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Konferensi Penelitian Sektor Publik II.
- [6] Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- [7] Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- [8] Hidayati, L.L.N dan Yaya, R. 2013. *Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik : Praktik di Pemerintah Daerah*. JAAI Volume 17 No. 2.
- [9] Mardiasmo. 2009. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- [10] Muliana. 2009 *Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU Dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara
- [11] Republik, Indonesia. 2004. *Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- [12] Republik, Indonesia. 2004. *Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- [13] Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- [14] Republik, Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- [15] Saruc, Naci Tolga dan Isa Sagbas. 2008. *The Surge Impact Of The Fypaper, Substituion And Stimulation Effect On Local Tax Effort In Turkey*. *International Research Journal Of Finance And Economics*. Euro Journals Publishing.
- [16] Rostina. 2014. *Pengaruh Belanja Modal Dan Investasi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/ Kota Se- Sumatera*. Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- [17] Simatupang, F. F. 2016. *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Propvinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- [18] Sivagnan, K, Jothi dan M., Naganathan. 1999. *Federal Transfer And The Tax Effort Of The States In India*. MPRA Paper No. 3208.
- [19] Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact Of Economic Growth And Development On Local Government Capacity*. *Journal of Pbulic Budgeting, Accounting and Financial Management*.